

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU DILIHAT DARI KODE ETIKNYA

OLEH SARDIMAN AM

I. PENDAHULUAN

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 antara lain dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memper^{tebal}tebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat ke^{tebal}masyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pembrantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai suatu realisasi dari tujuan pendidikan nasional, memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk partisipasi guru sebagai warga negara dan warga masyarakat. Apalagi guru dikenal sebagai tenaga profesional kependidikan, sudah barang tentu memiliki posisi yang cukup strategis dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan dan pembangunan bangsa. Sehingga boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atau buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru.

Melihat keterangan tersebut maka sesuai dengan dasar dan falsafah negara Pancasila, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Guru harus membimbing anak didik menjadi manusia pembangunan yang ber Pancasila, kemudian memiliki kejujuran profesional, selalu memelihara hubungan baik dengan anak didik, teman sejawat, orang tua murid/keluarga mau

pun masyarakat, mengenal anak didik, di samping harus selalu meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesionalnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Tugas dan tanggung jawab guru sebagaimana dikemukakan itu telah dirumuskan di dalam "Kode etik guru" Indonesia yang merupakan hasil keputusan kongres PGRI ke-13 tahun 1973.

Kode etik guru adalah suatu statemen formal yang merupakan norma dalam mengatur tingkah laku guru (D. Westby Gibson, 1965, 418). Oleh karena itu tidaklah begitu salah kalau dikatakan bahwa kode etik guru merupakan semacam penangkal dari kecenderungan manusia seorang guru yang ingin menyeleweng, agar tidak terlanjur menyeleweng. Kode etik guru juga merupakan perangkat untuk mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung jawab serta sekaligus untuk melindungi profesinya.

Bertolak dari uraian di atas maka pada tulisan ini akan dibahas mengenai pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru. Tugas dan tanggung jawab guru dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sesuai dengan yang dibebankan oleh kode etik guru. Permasalahan ini perlu diaktualisasikan mengingat guru sebagai tugas profesional, dalam masalah kode etik boleh dikatakan masih ketinggalan apabila dibandingkan dengan organisasi-organisasi profesional lainnya. Untuk itu maka pada uraian berikut akan dibahas berturut-turut : Pengertian kode etik guru, Guru sebagai pendidik dan pembimbing, guru harus memelihara kejujuran profesional dan meningkatkan profesinya, menciptakan suasana kehidupan sekolah dan hubungannya dengan lingkungan, pembinaan mutu organisasi guru profesional, guru sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah, terakhir penutup dan saran.

II PENGERTIAN KODE ETIK GURU

Secara harfiah "kode etik" berarti "sumber etik". Etik dalam hal ini dapat dikatakan sebagai "tata susila" (hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan) (Edi Suardi, 1980, 97). Dengan demikian kode etik guru dapat diterjemahkan sebagai aturan tata susila keguruan. Jadi aturan-aturan yang mengarahkan kegiatan dan pekerjaan guru itu akan selalu dikaitkan dengan faktor kesusilaan.

Kesusilaan guru maksudnya sopan santun atau keadaban dari seorang guru. Itulah sebabnya maka Westby Gibson memberikan pengertian secara umum bahwa "kode etik guru" ialah suatu statmen formal yang merupakan norma atau aturan tata susila dalam mengatur tingkah laku guru.

Mengapa perlu adanya kode etik bagi pekerjaan seorang guru ? Seperti telah disinggung di muka bahwa tugas dan tanggung jawab guru dalam pembangunan bangsa cukup berat. Oleh karena itu maka guru sebagai tenaga profesional, perlu adanya pedoman yang akan mengarahkan setiap kegiatan guru agar terhindar dari bentuk penyimpangan. Dan pedoman bagi kegiatan pekerjaan guru akan selalu dikaitkan dengan aspek kesusilaan. Kode etik guru juga menjadi pedoman bagi guru untuk tetap profesional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi) (Sardiman AM, 1982, 55). Dengan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga profesional, maka guru harus tetap berpegang pada kode etiknya. Sebab kode etik itu sendiri merupakan ciri dari suatu profesi.

III. GURU SEBAGAI PENDIDIK DAN PEMBIMBING

Mungkin sudah tidak asing lagi bagi publik untuk mengatakan bahwa pekerjaan guru adalah mengajar. Maksudnya menyampaikan materi pelajaran (*transfer of knowledge*) kepada anak didik agar meningkat kependaiannya atau memiliki kemampuan intelektual.

Pengertian secara umum dapat dijelaskan bahwa mengajar pada hakekatnya menyediakan kondisi optimal yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar anak didik untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan nilai/sikap yang dapat membawa perubahan tingkah laku maupun pertumbuhan sebagai pribadi (Raka Joni, 1977, 7). Pengertian mengajar semacam ini sudah merupakan pengertian yang lebih komprehensif, karena sudah menyangkut tugas-tugas guru yang lain, termasuk tugas mendidik. Jadi dalam kenyataannya memang guru tidak sekedar sebagai pengajar yang *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai pendidik (*transfer of values*) dan berperan sebagai pembimbing.

Mengenai tiga istilah mendidik, mengajar dan membimbing dalam tulisan ini sengaja tidak dipisahkan secara tegas dan tajam, tetapi akan dipergunakan dalam satu konteks yang saling mengisi.

Mendidik yang dapat dikatakan sebagai *transfer of values* sebetulnya memiliki makna yang cukup dalam. Guru dalam hal ini harus dapat menanamkan nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan ideologi bangsa kepada anak didik. Inilah sebenarnya merupakan tugas guru yang lebih fundamental. Dalam kaitan ini maka guru sebagai tenaga profesional tidak cukup hanya mempunyai kemampuan intelektual, tetapi figur guru harus merupakan gambaran dari suatu pribadi manusia yang lebih komprehensif. Nilai-nilai yang akan dipindahkan kepada anak didik harus sudah dimiliki dan menyatu dengan pribadi guru. Sehingga kalau diberlakukan teori belajar yang bertumpu pada konsep pembentukan super-ego, maka guru akan dipandang sebagai seorang figur atau tokoh tertentu yang dapat ditiru pribadi dan tingkah lakunya oleh anak didik. Oleh karena itu guru juga memiliki kriteria sebagai manusia yang sudah dewasa, manusia yang berpribadi utuh.

Sehubungan dengan itu maka mendidik dapat juga diterjemahkan sebagai usaha untuk memberikan tuntunan pada perkembangan atau mendewasakan anak didik kearah kedewasaan dalam arti jasmani-rokhani, agar nantinya dapat berdiri sendiri dengan norma-norma kemanusiaan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam usaha mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya ini memerlukan kegiatan pemberian materi pelajaran/pengertian dan kegiatan bimbingan, terutama bagi anak untuk memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan perkembangan yang lebih lancar, baik perkembangan fisik maupun sikap mental.

Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing, minimal ada dua fungsi yakni fungsi moral dan fungsi kedinasan. Tinjauan secara umum, guru dengan segala peranannya akan kelihatan lebih menonjol fungsi moralnya, sebab walaupun dalam situasi kedinasanpun guru tidak akan dapat melepaskan fungsi moralnya. Karena itu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik harus secara "sukarela",

tanpa pamrih dan semata-mata karena panggilan hati nurani (roeping) (Dirto Hadi Susanto, 1977, 242) Berkaitan dengan itu, ada beberapa alternatif yang perlu diperhatikan oleh para guru dalam menjalankan pengabdianya yaitu :

1. merasa terpanggil
2. mencintai dan mengasihsayangi anak didik
3. mempunyai rasa tanggung jawab secara penuh dan sadar mengenai tugasnya.

Ketiga alternatif itu saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena orang itu merasa terpanggil hati nuraninya untuk mendidik, maka ia harus mencintai anak didik dan menyadari sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan. Begitu juga karena seorang guru itu mencintai anak didik maka ia akan bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan pendidikan anak asuhannya karena panggilan hati nurani semata-mata.

Di samping itu, guru sebagai pendidik harus juga mampu berintegrasi dengan norma-norma dan nilai-nilai hidup bahkan bersedia mewakili nilai-nilai itu dihadapan anak didiknya (sifat keteladanan). Dan sudah barang tentu nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu guru juga dituntut untuk : percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki semangat kebangsaan dan kesetiakawanan, adil dan bijaksana, dewasa dalam berpikir dan mampu menjaga kestabilan emosional, aktif dan kreatif, disiplin, tekun dan sabar, berjiwa kepemimpinan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Inilah beberapa persyaratan sebagai modal bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing. Dan dengan modal yang sedemikian itu diharapkan manusia-manusia hasil didikan dari para guru ini akan menghasilkan manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila.

IV. GURU MEMELIHARA KEJUJURAN PROFESIONAL DAN MENINGKATKAN MUTU PROFESINYA.

Berbicara soal kode etik guru, berarti guru itu sendiri akan menjadi fokus pembahasan. Guru dapat dikatakan sebagai suatu sebutan terhadap profesi di bidang pendidikan. Profesi dalam hal ini tidak identik dengan pekerjaan buruh.

Oleh karena itu guru sebagai tenaga profesional kependidikan tidak dapat disamakan begitu saja dengan seorang pekerja atau buruh pada sesuatu instansi tertentu. Selain persyaratan sebagaimana diuraikan di atas, profesi guru memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang itu memperlihatkan perbedaan dengan pekerjaan pada umumnya. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya profesi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa di dalam pekerjaan profesional itu dipergunakan teknik serta prosedur yang berpijak pada landasan intelektual dan dipelajari secara sengaja (dalam waktu relatif cukup lama), yang kemudian dipergunakan demi kemaslahatan orang lain (Raka Joni, 1980, 6) Dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang pekerja profesional lain dengan seorang teknisi, karena di samping sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga ditandai dengan *informed responsiveness* (ketanggapan yang bijaksana) terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek pekerjaannya. Hal ini berarti seorang pekerja profesional dituntut memiliki filosofi yang mantap di dalam menyikapi serta melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu pekerja profesional nampak lebih cenderung kepada pekerjaan yang bersifat mental dari pada *manual work*. (Herman I. Peters, 1963; 174). Hal ini sinkron dengan persyaratan yang dituntut bagi guru yang bertugas sebagai pendidik, seperti misalnya harus taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan seterusnya.

Kemudian bagaimana guru dapat dikatakan memiliki kejujuran profesional. Guru sebagai tenaga profesional kependidikan dapat dikatakan memiliki dan memelihara kejujuran profesional apabila guru dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat atau ciri-ciri dari suatu profesi di bidang pendidikan. Dan pemenuhan terhadap semua persyaratan itu tadi, sekaligus secara konsisten guru melaksanakan kurikulum - sesuai dengan kebutuhan anak didik.

Adapun mengenai ciri-ciri keprofesian itu Dorothy Wetsby Gibson (1965) pernah mengemukakan sebagai berikut :

1. Diakui oleh masyarakat, dan layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai pekerja profesional.
2. Dikaitkan dengan penerapan kurikulum, berarti guru yang memenuhi keprofesionalitasnya tentu akan melaksanakan kurikulum sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik dan prosedur yang khusus, misalnya : Ilmu Mendidik, Psikologi Umum, Psikologi Perkembangan, Deduktif dan sebagainya.
4. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum melaksanakan pekerjaan profesional itu. Sebagai contoh guru sebelum diterjunkan ke lapangan harus dipersiapkan misalnya melakukan praktek keguruan. Termasuk dalam hal ini tentunya persiapan mengajar bagi yang telah menjadi guru dan materi yang dipersiapkan harus sesuai dengan subyek belajarnya.
5. Adanya semacam penyaringan atau klasifikasi berdasarkan kompetensi. Jadi mereka yang dianggap kompeten saja yang diperbolehkan bekerja. Hal ini erat dengan ciri yang pertama. Sebagai contoh orang yang mengajar Bahasa Indonesia seharusnya juga orang lulusan jurusan Bahasa Indonesia.
6. Dimilikinya organisasi profesional untuk melindungi kepentingan anggota dan yang penting sebagai sarana peningkatan mutu layanannya kepada masyarakat (Westby Gibson 1965, 422 - 423).

Di samping kriteria-kriteria tersebut di atas, masih ada ciri-ciri lain seperti misalnya yang dikemukakan Wolmer dan Mills bahwa pekerja profesional itu harus memiliki kode etik dan ottonomi jabatan, pekerjaannya merupakan karya bakti seumur hidup dan dibina secara organisatoris. (M.Ali Abubakar 1977, 12 - 13).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, guru harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Hal ini merupakan langkah yang cukup penting, karena baik buruknya layanan akan mempengaruhi citra guru di tengah

tengah masyarakat. Di samping itu secara fundamental guru memiliki peranan yang cukup urgen dalam kerangka pembinaan tunas muda harapan bangsa.

Adapun mengenai cara-cara meningkatkan mutu profesi guru dapat dilakukan :

1. Secara sendiri-sendiri, yaitu dengan jalan :
 - a. Menekuni dan mempelajari secara kontinu pengetahuan - pengetahuan yang berhubungan dengan teknis atau proses belajar mengajar secara umum, misalnya PBM dan ilmu - ilmu keguruan lainnya.
 - b. Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan
 - c. Melakukan-kegiatan-kegiatan mandiri.
 - d. Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengajaran, terutama yang berhubungan dengan materi yang dipegangnya.
 - e. Melakukan supervisi terhadap guru yang sudah senior
2. Secara bersama-sama, untuk ini dapat dilakukan dengan :
 - a. Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya
 - b. Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus, misalnya program akta ataupun re-edukasi bagi yang belum memenuhi kompetensinya.
 - c. Mengadakan kegiatan diskusi dan saling tukar pengalaman dengan teman sejawat terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi.
 - d. Membentuk kelompok-kelompok studi pembinaan keprofesian di tempat guru itu bekerja.

V. MENCIPTAKAN SUASANA KEHIDUPAN SEKOLAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN LINGKUNGAN.

Di muka telah dijelaskan bahwa pekerjaan profesional adalah demi kebaikan orang lain. Bagi guru jelas demi kebaikan anak didik, dalam arti keberhasilan membina kediriannya melalui proses belajar mengajar di sekolah. Mengenai keberhasilan proses belajar mengajar itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain suasana kehidupan sekolah termasuk dalam hal ini bagaimana hubungan guru dengan anak didik, hubungan dengan lingkungan, hubungan guru dengan orang tua - murid/keluarga dan hubungan guru dengan masyarakat. Kesemuanya ini adalah demi kepentingan anak didik.

A. SUASANA KEHIDUPAN SEKOLAH

Suasana kehidupan sekolah yang dimaksud adalah bagaimana menciptakan kondisi-kondisi optimal, sehingga anak itu merasa belajar, harus belajar, perlu dididik dan perlu bimbingan. Dalam usaha menciptakan suasana kehidupan sekolah sebagaimana yang dimaksud, akan menyangkut beberapa persoalan.

Pertama : yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas secara langsung. Untuk ini akan meliputi :

- a. pengaturan tata ruang kelas yang lebih kondusif untuk kepentingan pengajaran.
- b. menciptakan iklim atau suasana belajar mengajar yang lebih serasi dan menyenangkan, misalnya pembinaan situasi keakraban di dalam kelas. Kemudian menurut Louis Johnson dan Mary Bany, dalam menciptakan iklim yang lebih serasi ini antara lain dengan :
 - 1). adanya keterikatan antara guru dengan anak didik, anak didik dengan anak didik
 - 2). menetapkan standart tingkah laku
 - 3). diadakan diskusi-diskusi kelompok
 - 4). memberikan penghargaan dan pemeliharaan semangat kerja. (Sudjadi, Pengelolaan Kelas, Bahan Pen-Lok, IKIP Surabaya, 1979, 8).

Kedua : menciptakan kehidupan sekolah dalam arti yang lebih luas, yakni meliputi sekolah secara keseluruhan. Dalam kaitan ini dituntut adanya hubungan baik dan interaksi antara guru dengan anak didik, guru dengan pegawai, pegawai dengan anak didik. Dengan demikian dituntut adanya keterlibatan dari semua pihak di dalam lembaga kependidikan, sehingga dapat menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Untuk ini dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan misalnya olah raga, kesenian, dan kegiatan-kegiatan ko-kurikuler lainnya yang dapat menunjang pengembangan aktivitas dan kreatifitas anak didik.

B. HUBUNGAN GURU DENGAN ANAK DIDIK

Hubungan guru dengan anak didik adalah salah satu sarana untuk menciptakan suasana kehidupan sekolah yang lebih ba

ik, agar anak didik memperoleh keberhasilan secara optimal. Sehubungan dengan itu maka yang lebih penting bagaimana guru dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anak didik dalam rangka memperoleh berbagai informasi tentang keadaan dan latar belakang kehidupan anak didik. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai beberapa hal :

1. Segala bentuk kekakuan dan ketakutan harus dihilangkan dari perasaan anak didik dan sebaliknya harus dirangsang sedemikian rupa sehingga bersifat terbuka, berani mengemukakan pendapat dan segala masalah yang dihadapi di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Semua tindakan guru terhadap anak didik harus mengandung unsur kasih sayang seperti orang tua pada anaknya. Guru harus memelihara sifat ramah, sabar, terbuka, bahkan kalau perlu dapat sedikit mempunyai rasa humor dengan penampilan yang cukup menarik.
3. Diusahakan guru dan anak didik dalam satu kebersamaan orientasi agar tidak menimbulkan konflik. Perlu dimaklumi bahwa sekolah itu sendiri merupakan kelas-kelas sosial yang masing-masing berbeda orientasinya.

Dari ketiga alternatif itu sebenarnya mengandung semacam tuntutan agar guru menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan anak didik, sehingga anak didik merasa dekat dan terbuka kepada gurunya, kemudian berani atau terangsang untuk mengemukakan pendapat dan segala problema yang ada pada diri anak didik. Dan sebagai pengganti orang tua, guru harus dapat memberikan rasa aman dan tenteram pada anak asuhannya. Dengan suasana hubungan yang harmonis ini guru akan dapat mengkaji dan mengetahui lebih banyak mengenai karakteristik dan latar belakang kehidupan anak didik dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi, untuk kemudian guru membantu memecahkan. Hal ini relevan dengan tugas guru sebagai pembimbing. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa suasana hubungan yang harmonis itu jangan sampai disalahgunakan, baik dalam proses komunikasi maupun setelah memperoleh informasi. Sebab guru sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kecenderungan berbuat salah, apalagi ada situasi yang menunjangnya. Hal ini dapat dihindarkan apabila guru betul-betul menempatkan dirinya secara proporsional sesuai dengan keprofe-

siannya, misalnya dengan :

1. Menyadari dirinya sebagai guru yang memiliki sifat - keteladanan.
2. Menyadari bahwa dirinya sebagai pengganti orang tua di sekolah.
3. Menyadari bahwa pekerjaannya dilakukan demi kemaslahatan orang lain.

C. HUBUNGAN DENGAN ORANG TUA MURID

Hubungan antara guru dan orang tua murid/anak didik merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mengusahakan keberhasilan proses belajar mengajar. Karena dengan hubungan baik ini telah membantu guru dalam mengidentifikasi karakteristik dan latar belakang kehidupan anak didik. Jadi disamping melalui anak sendiri, informasi tentang karakteristik - siswa dapat diperoleh pula dari orang tua murid. Oleh Ag. Soejono dikemukakan adanya beberapa keuntungan mengenai hubungan guru dan orang tua murid, antara lain :

1. Memungkinkan guru mengetahui keadaan murid di rumah dan mengenal kondisi dan situasi keluarga muridnya. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengajaran dan pendidikan.
2. Guru dapat mengetahui perangai anak didiknya yang berguna untuk pengisian buku pribadi anak setepat mungkin.
3. Akan membina saling pengertian, percaya mempercayai dan saling mempertemukan perbedaan-perbedaan dalam menunaikan tugas bersama mendidik anak. Masing-masing pihak akan saling memberikan keterangan tentang diri anak untuk mengambil langkah yang lebih tepat dalam pembinaan tingkah laku anak didik (Ag. Soejono, 1980, p.96).

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan orang tua murid antara lain :

1. Kegiatan kunjungan rumah kepada orang tua murid.
2. Pertemuan-pertemuan formal antara guru dan orang tua murid misalnya melalui BP3.

3. Mengundang mengikutsertakan orang tua murid dalam berbagai kegiatan sekolah yang ko-kurikuler misalnya acara ke-
senian, perayaan-perayaan dan sebagainya.

D. HUBUNGAN GURU DENGAN MASYARAKAT

Di atas sudah disinggung bahwa keberhasilan proses be-
lajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain hu-
bungan guru dengan anak didik dan hubungan guru dengan orang
tua murid. Selain itu nampaknya faktor hubungan antara guru
dan masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan. Hal ini sesuai
dengan prinsip pendidikan sumur hidup dan berlangsung di ti-
ga lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hu-
bungan ini Ki Hadjar Dewantoro pernah mengemukakan bahwa pen-
didikan di dalam masyarakat itu akan lebih menonjolkan pembi-
naan rasa tanggung jawab dan demokrasi. Dan di dalam masyara-
kat itu pulalah tempat perkembangannya berbagai kebudayaan
yang beraneka ragam. Oleh karena itu hubungan guru dan masya-
rakat menjadi semakin penting artinya dalam rangka pembentuk-
an kebudayaan nasional. Guru dalam hal ini akan berperan se-
bagai agen kebudayaan di dalam masyarakat. Berkaitan dengan
ini perlu kiranya dicatat pendapat J. Havighurst yang menegaskan
adanya dua fungsi sistem pendidikan yaitu sebagai cermin
an dari keadaan masyarakat, dan yang kedua sekolah / sistem
pendidikan sebagai agen perubahan sosial (R.J. Havighurst.
1964, 274).

Selanjutnya mengenai masyarakat ada dua lingkungan yai-
tu lingkungan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat
secara luas. Masyarakat di sekitar sekolah dapat diterjemah-
kan sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah atau
masyarakat yang ada di daerah atau kelompok suku tempat se-
kolah itu berada. Guru sebagai pendidik dan pengganti orang
tua murid harus selalu mengadakan hubungan baik dengan masya-
rakat. Sebab bagaimanapun juga keadaan masyarakat ini akan se-
lalu disimak dan dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan bu-
daya anak. Di lingkungan ini pula anak didik menerima berba-
gai adat atau mewarisi budaya nenek moyang. Guru harus mema-
hami perkembangan budaya masyarakat sekitar yang akan berin-
tegrasi menjadi kebudayaan nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dapat ditempuh adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum.
2. Guru selalu mengadakan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat.
3. Bersama-sama mengadakan upacara-upacara baik yang bersifat nasional maupun keagamaan
4. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Kemudian mengenai masyarakat luas dapat diterjemahkan - sebagai masyarakat pada umumnya tidak terbatas pada suatu daerah saja, tetapi menyeluruh bersifat nasional, termasuk mungkin lingkungan tempat asal dari anak didiknya. Masing-masing lingkungan itu jelas akan memberikan dampak yang berbeda pula dalam perkembangan budaya anak. Jadi masyarakat itu dapat dipandang sebagai suatu institusi sosio-kultural yang dapat mewarnai perkembangan anak yang notabene akan mempengaruhi dalam proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu guru perlu mengadakan hubungan dengan masyarakat umum dalam rangka mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor heterogenitas budaya masyarakat, untuk dapat mempersiapkan perencanaan pendidikan kearah pembentukan kebudayaan nasional.

Mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat secara luas antara lain adalah :

1. Mengadakan studi tour. Dalam kegiatan ini sekaligus mengadakan pendekatan dengan masyarakat termasuk mengenal dan mempelajari adat dan budayanya.
2. Mengadakan kemah kerja dengan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat.

VI. PEMBINAAN MUTU ORGANISASI GURU PROFESIONAL

Salah satu ciri profesi adalah suatu karier yang harus dibina secara organisatoris. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia yang selalu ingin hidup berkelompok untuk bekerja sama. Oleh karena itu guru sebagai tenaga profesional kependidikan juga dihimpun dalam suatu organisasi profesional yang di Indonesia namanya PGRI. Organisasi ini sebagaimana layaknya

organisasi profesional di samping untuk melindungi kepentingan anggota juga untuk wadah meningkatkan mutu profesinya agar dapat memberikan layanan terhadap masyarakat secara memuaskan. Dengan demikian PGRI mau tidak mau akan merupakan wahana perjuangan bagi para guru untuk bekerja demi kebaikan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka organisasi PGRI harus selalu dipelihara dan ditingkatkan mutu dan perannya. Dan akan lebih tepat kalau pembinaan itu dilaksanakan oleh para guru secara bersama-sama, agar dapat menciptakan mekanisme yang lebih tepat dan lancar. Sebetulnya kurang tepat kalau pembinaan itu justru dilakukan oleh pihak di luar profesi di bidang pendidikan. Karena organisasi itu anggotanya para guru yang memiliki spesifikasi tertentu dalam bekerja yaitu pekerjaan yang lebih bersifat kiat (Daeed Joesoef, 1979), yang jarang dimiliki oleh pihak lain. Oleh karena itu faktor hubungan baik atau kekompakan sesama para anggota (guru) akan sangat menentukan, baik itu hubungan antara guru di lingkungan tempat bekerja maupun guru secara keseluruhan sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat ditempuh misalnya dengan :

1. Guru senantiasa saling tukar informasi, saling nasehat menasehati dan bantu membantu satu sama lain baik dalam kepentingan penunahan tugas profesi maupun kepentingan pribadi.

2. Guru tidak melakukan tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesi (Rindorindo, 1979, 9).

Di samping itu masih ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain :

1. Dibentuk kelompok-kelompok studi, seperti di muka telah disebutkan.

2. Kerja sama dalam berbagai kegiatan penelitian

3. Diadakan pertemuan dewan guru secara kontinu

4. Diadakan kerja sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain.

Sehingga pembinaan hubungan baik antara sesama guru adalah merupakan langkah pertama yang cukup konstruktif dalam rangka meningkatkan mutu organisasi guru profesional secara integral. Kerja sama atau hubungan baik antara para guru paling

tidak merupakan awal dari pembinaan disiplin kelompok untuk saling berkonsultasi dan tukar pengalaman baik yang menyangkut keprofesionalitasnya, kemasyarakatan maupun soal organisasinya itu sendiri. Langkah-langkah lain yang perlu diambil dalam meningkatkan mutu organisasinya adalah :

1. Diadakan up-grading atau penataran mengenai keorganisasian, kepemimpinan dan manajemen
2. Dilaksanakan pembinaan mentalnya idiologi maupun pembinaan sikap sosial, misalnya melalui ceramah-ceramah di samping harus mendalami AD dan ART.
3. Dilaksanakan penataran-penataran dalam rangka pembinaan pengetahuan dan ketrampilan guru
4. Diadakan program kunjungan antara PGRI daerah yang satu dengan daerah yang lain.
5. Dilaksanakan MUKER PGRI secara rutin
6. Menyusun kebijaksanaan dan program kegiatan organisasi yang dapat meningkatkan peranan organisasi PGRI misalnya dengan :
 - a. memberikan saran dan kritik pada kebijaksanaan pemerintah
 - b. ikut memberikan pemikiran mengenai berbagai pembaharuan pendidikan.
 - c. memberikan sanksi kepada setiap penyelewengan bagi para anggota.

VII. GURU SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Guru adalah bagian dari warga negara dan warga masyarakat yang merupakan aparat Departemen P dan K atau aparat pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah c.q. Departemen P dan K sebagai pengelola bidang pendidikan sudah barang tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan policy agar pelaksanaannya dapat terarah.

Guru sebagai aparat dari Departemen P dan K dan pelaksana langsung kurikulum dan proses belajar mengajar, harus memahami dan kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan pendidikan.

Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu diharapkan proses pendidikan berjalan lancar dan akan menqang bagi pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral. Sebaliknya kalau tidak melaksanakan mungkin akan terjadi ketidakserasian atau kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dengan program yang telah ditetapkan. Atau mungkin akan menimbulkan perkembangan yang berbeda dengan maksud yang dicita-citakan.

Di samping itu mengingat peranan guru yang sangat penting di dalam pendidikan generasi bangsa, maka kalau tidak mematuhi aturan permainan yang telah ditetapkan, boleh jadi akan menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Sebagai contoh perannya sebagai penyebar ide. Kalau ide yang disebar itu tidak sesuai atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah, kemungkinan akan melahirkan satu paradigma yang berbeda dengan nilai-nilai budaya Pancasila. Inilah alasan yang cukup kuat mengapa guru harus melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan pemerintah, sehingga akan tercipta suatu integrasi sosial yang lebih mantap.

Untuk mengarahkan kepada suatu maksud sebagaimana diuraikan di atas maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Guru harus memahami betul-betul maksud dan arah pendidikan nasional.
2. Meningkatkan profesi dan kesadaran guru memenuhi hakekat keprofesiannya.
3. Dilakukan pengawasan dari pihak pemerintah
4. Diadakan "sanksi" bagi setiap pelanggaran
5. Dalam setiap kegiatan menetapkan kebijaksanaan pemerintah yang berkenan dengan pembaharuan pendidikan, perlu mengikutsertakan wakil-wakil dari guru (PGRI).

VIII. PENUTUP DAN SARAN

Demikianlah beberapa pokok pemikiran mengenai kode etik guru yang mempedomani bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan profesi yang dimiliki. Hal ini sangat penting mengingat besarnya peranan dan tanggungjawab guru di dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Oleh karena itu profesinya harus dilindungi dan pelaksanaannya harus diarahkan demi kemaslahatan orang lain.

S A R A N :

1. Perlu mengefektifkan peranan organisasi PGRI
2. Membudayakan kode etik guru dikalangan para guru sejak dari TK sampai Perguruan Tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Abubakar, M., "Guru dan Tugas-tugasnya dalam Jabatan", *Majalah Dep. P dan K.*, no.5/Agust, 1977.
- Daed Joesoef, Pidato Sambutan pada Lustrum III IKIP Surabaya, Desember 1979.
- Dirto Hadi Susanto, *Capita Selecta Pendidikan dan Masalah - masalah Pokoknya*, FIP IKIP Yogyakarta, 1977.
- Gibson, Westby, D., *Social Perspective on Education*, Johnson Wiley dan Sons Inc., New York-London, 1965.
- Havighurst, Robert J., *Society and Education*, Allyn Bacon Inc., Boston, 1964.
- Peters, Herman J., *Introduction to Teaching*, The Mac Millan Company, New York, 1963.
- Raka Joni T., "Teori Mengajar dan Psikologi Belajar", *Majalah Dep. P dan K.*, 3/Juni, 1977.
- Pengembangan Kurikulum IKIP/FIP/FGK suatu Kasus Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*, P3G., Dep P dan K. Jakarta, 1980.
- Rinirindo, "Pengembangan Profesi Guru", *Suara Guru*, XXIX, 1979.
- Sardiman AM, *Suatu Pengantar ke dalam Interaksi Belajar Mengajar*, Wujudnya FKIS IKIP Yogyakarta, 1982.
- Soejono, Ag., *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, CV. Ilmu, Bandung, 1980.
- Sudjadi, "Pengelolaan Kelas, Bahan Pen-Lok", IKIP Surabaya, 1979.